
IMPLEMENTASI PLATFORM MERDEKA MENGAJAR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN TINGKAT SMP DI KABUPATEN SUMEDANG

Irma Hermayanty*¹, Aqil Septian Setiadi², Bunga Meidy Aprilia³, Dini Aulia⁴, Eva Sri Rohaeni⁵,
Rachmawati Bela Putri⁶, Tony Abdul Mugni⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Nov 12, 2023

Revised Des 15, 2023

Accepted Des 23, 2023

Keywords:

Public Policy

Implementation

Public Service

Platform Merdeka Mengajar

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the use of the Merdeka Mengajar Platform on the quality of education services at the junior high school level at the Sumedang District Education Office which is implemented in Sumedang District. The method used in the preparation of this research report is a qualitative method with a descriptive type. The sampling technique used is purposive sampling, with research informants: Head of Middle School Education Sector, Head of Middle School Curriculum and Student Affairs, Educators for the curriculum section of SMP Negeri 1 Cimalaka Sumedang, and educators for the curriculum for SMP Negeri 9 Sumedang. Data collection techniques through library research and field studies, namely by observing, interviewing, and documenting. Based on the results of interviews, observations, and documentation, data analysis was then carried out and it was concluded that the use of the Merdeka Mengajar Platform at the Sumedang Regency Middle School level itself was still not optimal, however, the Sumedang Regency Education Office was swift in handling the problem regarding this PMM complaint and outreach PMM regularly and well.



Copyright © 2023 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Irma Hermayanty

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jl. Angrek Situ No. 19 Sumedang

Email:

1. INTRODUCTION

Pada hakekatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat, kebijakan ini bertujuan memaksimalkan pelayana prima dan professional, memberikan pelayanan berpedoman terhadap prinsip-prinsip pelayanan publik. Pelayanan publik dapat dilakukan pemerintah maupun non pemerintah jika pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintah merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa ruang lingkup layanan publik salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan merupakan *human inverstment* yaitu suatu usaha atau modal yang dikeluarkan untuk mneghasilkan manusia terdidik, cerdas dan unggul untuk mengisi kebutuhan masa depan bangsa Indonesia. Untuk mengisi kebutuhan pendidikan di masa depan maka mengacu pada visi pendidikan nasional yaitu : “Mewujudkan iman Indonesia yang cerdas komperhensif pada tahun 2025”. Adapun visi pendidikan nasional disingkat M5K5, yaitu:

1. M1K1 : Meningkatkan ketersediaan pelayanan pendidikan.
2. M2K2 : Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan
3. M3K3 : Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan
4. M4K4 : Meningkatkan kesetaraan pendidikan
5. M5K5 : Meningkatkan kepastian/keterjaminan layanan pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sudah diatur secara sistematis dan terencana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan pendidikan tentunya tak lepas dari peran pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menyelenggarakan serta mengusahakan suatu pendidikan pada setiap warga negaranya guna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Kurikulum merupakan suatu alat yang penting bagi pendidikan karena pendidikan dan kurikulum saling berkaitan. Kurikulum akan berubah secara terus menerus dan berkelanjutan. Jika diibaratkan, kurikulum layaknya jantung dalam tubuh manusia. Jika jantung masih berfungsi dengan baik, maka tubuh akan tetap hidup dan berfungsi dengan baik. Begitu pula dengan kurikulum dan pendidikan. Apabila kurikulum berjalan dengan baik dan didukung dengan komponen-komponen yang berjalan baik pula, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan menghasilkan peserta didik yang berkualitas.

Dalam lingkup pendidikan teknologi informasi sangat diperlukan untuk membantu kegiatan operasional. Dengan peralatan teknologi yang canggih akan mempercepat kinerja pengajar dan akan memberikan hasil yang maksimal. Merujuk pada kondisi dimana COVID-19 yang menyebabkan banyaknya kendala dalam proses pembelajaran disatuan Pendidikan yang memberikan dampak yang cukup signifikan. Kurikulum 2013 yang digunakan pada masa sebelum pandemic satu-satunya kurikulum yang digunakan satuan pendidikan dalam pembelajaran.

Tabel 1. Kurikulum Yang Digunakan Saat Pandemi

Periode	Kurikulum
2020-2021	Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat
2021-2022	Kurikulum Merdeka

(sumber : guru.kemendikbud.co.id)

Kemertrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengembangkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang merupakan platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk pendidik dalam mewujudkan Pelajaran Pancasila yang memiliki fitur Belajar, Mengajar, dan Berkarya. Platform Merdeka Mengajar memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapan pun dan di mana pun guru berada. Fitur Belajar pada Platform Merdeka Belajar memberikan fasilitas Pelatihan Mandiri yang memberikan kesempatan kepada guru dan tenaga pendidikan untuk dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas dengan mengakses secara mandiri. Fitur lain Belajar adalah Video Inspirasi, fitur ini memberikan kesempatan kepada guru dan tenaga kependidikan bisa mendapatkan beragam video inspiratif untuk mengembangkan diri dengan akses tidak terbatas yang pada akhirnya adalah mengembangkan kualitas dari kompetensinya dalam implementasi kurikulum merdeka.

Platform Merdeka Belajar (PMM) diterapkan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2021. Program PMM tidak jauh berbeda dengan program yang sebelumnya yaitu Kurikulum 2013 (kurtilas). Program PMM bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Platform Merdeka Belajar (PMM) sudah dikaitkan dengan system pendidikan nasional tahun 2003 No. 23 dijelaskan bahwa PMM dimasukan kedalam tiga jenjang yaitu:

Tabel 2. Tingkatan Pendidikan di Indonesia

NO	FORMAL	NON FORMAL	INFORMAL
1	SD	Paket A	Lingkungan Keluarga
2	SMP	Paket B	
3	SMA	Paket C	
4	PERGURUAN TINGGI		

(sumber : Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)

Di Kabupaten Sumedang Program Platform Merdeka Mengajar (PMM) sudah memiliki Peraturan Bupati yang dinamakan Program Transformasi Sekolah Simpati (PTSS) diatur oleh Perbup no 1, 2, dan 3 tentang PTSS. Tujuan dari Program Transformasi Sekolah Simpati (PTSS) untuk mewujudkan Program Merdeka Mengajar di sekolah yang ada di Kabupaten Sumedang. Program PTSS ini berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi hingga karakter, diperkuat dengan SDM yang unggul mulai kepala sekolah sampai gurunya. PMM yang dikembangkan diharapkan mampu menjadi partner guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka dengan semangat kolaborasi dan saling berbagi. Konten-konten yang dikembangkan oleh Kemendikburistek memberikan pemahaman lebih saat implementasi dan pembelajaran di satuan pendidikan yang telah ikut serta dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Sasaran Platform Merdeka Mengajar difokuskan untuk tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dengan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, ternyata diketahui bahwa penerapan program Platform Merdeka Belajar (PMM) pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya merata di berbagai sekolah, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi sebagai berikut:

1. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah lanjut usia mengalami kesulitan dalam menggunakan Platform Merdeka Mengajar. Hal ini dibuktikan karena tidak mampu menggunakan gawai dengan waktu yang lama. Hal ini senada disampaikan oleh Kasi bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tabel 3. Kelompok Umur

KELOMPOK UMUR						
NO	31-35	36-40	41-45	46-50	≥ 51	JUMLAH
1		1918	2555	1161	1240	6874

(sumber : Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)

2. Adanya beberapa daerah yang tidak terjangkau dengan jaringan internet dan kecepatan jaringan internet yang tidak merata karena demografi di Kabupaten Sumedang. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa sekolah di daerah terpencil kesulitan mendapatkan sinyal yang kuat. Hal ini senada disampaikan oleh Kasi bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tabel 4. Daftar Sekolah Dengan Kecepatan Internet Lemah

No	Nama Sekolah
1	SMPN 3 Wado
2	SMPN 1 Surian
3	MTS Negeri 4 Sumedang
4	SMPN 1 Jatinunggal

(sumber : hasil wawancara dengan Kasi bidang SMP)

3. Kualitas pengawas sekolah terhadap platform merdeka mengajar ini masih jauh dari standar dan jumlah pengawas relatif kurang. Hal ini dibuktikan dengan penerapan platform merdeka mengajar di berbagai Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sumedang masih kekurangan pengawasan program PMM. Hal ini senada disampaikan oleh Kasi bidang Sekolah Menengah Pertama SMP.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka fokus penelitian ini yaitu bagaimana implementasi platform merdeka mengajar dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan tingkat SMP di Kabupaten Sumedang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur implementasi platform merdeka mengajar dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan tingkat SMP di Kabupaten Sumedang.

2. METHOD

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik (menyeluruh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2017). Dalam pelaksanaan penelitian ini, populasi penelitian terdiri pegawai bidang pendidikan SMP sebanyak 10 orang. Berdasarkan jumlah populasi tersebut maka peneliti menggunakan teknik sampling berupa *purposive sampling* di dalam menentukan informan penelitian. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Dengan demikian jumlah informan penelitian ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari.

Tabel 5. Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Bidang Pendidikan SMP	1 orang
2	Kepala Seksi Kurikulum & Kesiswaan	1 orang
3	Tenaga Pendidik	2 orang
4	Bidang Kurikulum	1 orang
Jumlah		5 orang

(sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan beberapa teknik pengumpulan data yang terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Untuk studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung dan wawancara. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah oleh peneliti dengan menempuh beberapa prosedur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Untuk mengukur implementasi platform merdeka mengajar dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan tingkat SMP di Kabupaten Sumedang, peneliti merujuk pada teori implementasi dari Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008, 142) yang terdiri dari:

1. Standar sasaran kebijakan
2. Komunikasi
3. Sikap pelaksana
4. Sumber daya
5. Kinerja kebijakan
6. Karakteristik
7. Lingkungan sosial

3. RESULTS AND DISCUSSION

Platform merdeka mengajar adalah teknologi yang disediakan untuk menjadi penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Platform merdeka mengajar di bangun untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum merdeka. Satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka akan banyak menggunakan platform yang dibuat kemendikbud. Platform merdeka mengajar merupakan bagian dari perubahan kurikulum baru. Dalam hal ini platform merdeka mengajar dirancang untuk membantu guru meningkatkan kompetensi dan melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum merdeka, materi yang tersedia dalam platform tetap relevan untuk digunakan oleh guru yang menggunakan kurikulum lainnya. Kemendikbud menyediakan website yang bernama Belajar id. Website belajar id merupakan platform digital untuk administrasi pelaksanaan sekolah meliputi kegiatan belajar mengajar, absensi, rapot, evaluasi, rekap penilaian, penerimaan peserta didik baru, hingga pembayaran secara digital, sehingga dapat menunjang sekolah menuju sekolah professional, efektif dan akuntabel.

Pada dasarnya konsep merdeka belajar terdiri dari tiga komponen yaitu, adanya komitmen terhadap tujuan kemandirian dalam menentukan cara belajar, dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Tujuan utama dari kebijakan merdeka belajar dilaksanakan dalam rangka untuk percepatan pencapaian tujuan nasional pendidikan. Dalam hal ini yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang mempunyai keunggulan dan daya saing. Diluncurkannya dan diberlakukannya Platform Merdeka Mengajar ini tidak lain untuk memberikan ruang yang seluas luasnya kepada guru maupun siswa untuk secara mandiri bereksplorasi bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran.

Peneliti akan menguraikan hasil penelitian tentang implementasi program platform merdeka mengajar dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Adapun penyusunan hasil penelitian ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

Keseluruhan data yang diperoleh peneliti berdasarkan hasil studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi, menunjukkan banyaknya data dengan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini. Gambaran mengenai hasil implementasi berdasarkan focus permasalahan yang telah ditentukan peneliti dan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi program platform merdeka mengajar dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, sebagai objek yang diteliti dan dapat diinterpretasikan.

Selanjutnya, untuk dapat menjelaskan jawaban mengenai adanya fokus permasalahan penelitian sebagaimana yang dijelaskan dalam BAB sebelumnya, kemudian untuk menganalisis data hasil dari penelitian. Lebih lanjut untuk dapat mempermudah analisis data dari hasil penelitian yang akan dijelaskan dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian berdasarkan dimensi-dimensi yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dan faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan menurut Darwin dan upaya-upaya mengatasi hambatan implementasi kebijakan menurut Bambang Sunggono, di antaranya :

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam implementasi kebijakan (1975:460), yaitu

- a. Standar sasaran kebijakan
- b. Komunikasi
- c. Sikap pelaksana
- d. Sumber daya
- e. Kinerja kebijakan
- f. Karakteristik
- g. Lingkungan sosial

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil keseluruhan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sebagai berikut :

Tabel 6. Rekapitulasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Fokus Permasalahan	Fokus Teori	Kesimpulan
Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn	Standar Kebijakan	Tenaga pendidik dan kependidikan di Kabupaten Sumedang di jenjang SMP mereka sudah paham, sudah mengerti, sudah mengaplikasikan dan menerapkan terhadap kegiatan belajar mengajar sehari-hari. untuk menerapkan dan mewujudkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Sumedang agar mereka dalam melaksanakan PMM dan melaksanakan IKM Kabupaten Sumedang sesuai dengan aturan yang berlaku tentu saja tidak sembarangan, itu harus ada langkah-langkah yang pertama yaitu harus ada sosialisasi dulu, di sosialisasikan kepada semua sekolah yang ada di Kabupaten Sumedang.
	Komunikasi	Untuk berkomunikasi dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kita selalu intens setiap saat kita selalu ada komunikasi baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, baik itu melalui media sosial semacam whatsapp adakan instagram atau facebook kita selalu ada komunikasi setiap saat bahkan itu tidak terbatas oleh waktu atau mungkin melalui pengawas-pengawas artinya komunikasi selalu intens dan tidak terbatas oleh waktu. Seperti diketahui, PMM merupakan fasilitas teknologi yang sudah disiapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menunjang penerapan IKM. PMM diadakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya.
	Sikap Pelaksana	Responsif cepat tanggap, misalnya ada pengaduan-pengaduan ada kendala-kendala teknik dan non teknik ataupun mereka kurang mengerti terhadap

	<p>sesuatu kita langsung proaktif, artinya kita selalu proaktif ketika ada aduan atau kendala-kendala yang dari bawah dari tenaga pendidik dan kependidikan yang terkait dengan proses PMM selalu proaktif dan selalu cepat tanggap dan segera menyelesaikan permasalahan. bahwa selalu ada informasi dari pusat itu langsung share dan sebelum di share ke di dinas pendidikan mempelajari terlebih dahulu bersama-sama karna ada PMO, PMO itu tiap jenjang SD,SMP, baru share kemudian ke sekolah-sekolah.</p>
Sumber Daya	<p>Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan harus mampu mengembangkan diri, kesempatan yang setara bagi guru dan juga tenaga kependidikan untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapan pun dan di mana pun berada. Pemerintah Kabupaten Sumedang itu sampai hari ini belum ada, anggaran khusus untuk kegiatan PMM ya atau IKM khusus nya jenjang SMP dari PEMKAB APBD2 Sumedang itu tidak ada belum ada, tapi kalo anggaran dari pusat setiap saat ada banyak cuma saya gatau berapanya anggarannya, yang penting bahwa untuk anggaran pusat ataupun provinsi itu ada hanya untuk anggaran untuk IKM atau PMM dari Kabupaten Sumedang khusus APBD2 sampai hari ini belum ada mudah mudahan nanti ada.</p>
Kinerja Kebijakan	<p>Dampak yang ditimbulkan oleh program PMM terhadap tenaga pendidik dan tenaga pendidikan tentu ada, kemampuan guru bertambah karena itu semacam diklat online. Menambah pengetahuan tentang kurikulum baru, tentang Implementasi Kurikulum Merdeka.Mulai dari langkah pembelajaran atau juga melihat dari praktek dari orang lain atau sekolah lain,ada webinar pokona nambah ilmu buat kita untuk melaksanakan pembelajaran kurikulum yang baru.</p>
Karakteristik	<p>Cara untuk mempertahankan dan memajukan agar PMM tetap eksis di Kabupaten Sumedang adalah berbagai macam-macam cara dengan cara BIMTEK,IHT, atau kita langsung share materi-materi yang sudah kita dapatkan dari kemarin yang saya bimtek itukan saya langsung share lewat wa grup biar engga di tunda-tunda itu saya dapat informasi saya dapat ilmunya dari mereka materinya saya sedot saya sharekan lagi melalui wa grup dan mereka langsung mendapatkan. Agar tetap PMM IKM di Kabupaten Sumedang tetep eksis bisa bertahan. komitmen kita sebagai karyawan atau staff atau pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dalam melakukan melayani mereka itu kita tidak tebang pilih tidak pandang bulu semua kita layani</p>
Lingkungan Sosial	<p>Kita seragamkan dulu pemahaman kita terhadap sesuatu agar datang ke sekolah pun warnanya sama semua tidak berbeda-beda, nahh jadi kita ada pemahaman dulu ya ada diskusi dulu ada FJD</p>

(Fokus Jip Dikusion) setelah ada grup fokus JIP dikusion kita membentuk tim gitukan help dest misalnya kita bentuk tim nih ketuanya ini, bendaharanya ini kalo ada duit kalo gaada duit ngapain buat bendahara ya ada sekertarisnya ada anggotanya. kalau PMM itu lebih besar ke guru atau tenaga pendidik di sini coba lihat ini pmm ya isinya ya. asesmen murid, perangkat ajar, capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran (atp), pengembangan mandiri, pelatihan mandiri, komunitas mgmp nasional. jadi semua unsur masyarakat bisa di sini (PMM) mau guru TK, mau dosen, mau rektor semua di sini ada untuk IKM. ini bukti karyanya video inspirasi, lebih banyak menekankan kepada guru di sini, kalau tenaga kependidikan berdampak tidak dari sini jadi administrasinya saja.

Sumber : Hasil Wawancara di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Platform ini sudah sesuai dan sudah dijalankan dengan cukup baik, bahwasannya Platform Merdeka Mengajar ini dapat membantu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. selain itu juga Dinas Pendidikan Responsif terhadap keluhan yang dialami tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan, Platform ini juga disosialisasikan secara intens melalui berbagai media yang digunakan. Cara untuk mempertahankan dan memajukan agar PMM tetap eksis di Kabupaten Sumedang adalah berbagai macam-macam cara dengan cara BIMTEK, IHT, atau langsung share materi-materi yang sudah didapatkan.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III, 1980:1), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu : komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap dan struktur birokrasi (Edward III, 1980:1) keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya.

Van Meter dan Van Horn (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau permofmansi suatu pengejewan paham kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Dari kedua teori di atas bahwasannya pengimplementasian kebijakan public didasari dengan penyaluran komunikasi, sesuai dengan kesimpulan pada tabel bahwasannya Platform Merdeka Mengajar ini disosiliasasikan dengan baik, selain itu juga dalam kedua kategori tersebut menyebutkan pelaksana yang mana dkaitkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang mereka sudah responsif terhadap keluhan. Terakhir, dalam kedua teori tersebut menyebutkan sumber daya yang mana Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan harus mampu mengembangkan diri, kesempatan yang setara bagi guru dan juga tenaga kependidikan untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapan pun dan di mana pun berada.

4. CONCLUSION

Implementasi Platform Merdeka Mengajar ini sudah dilakukan dengan cukup baik, hal ini dibuktikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dalam hasil wawancara bahwasannya Implementasi Platform Merdeka Mengajar ini sudah sesuai menurut Dinas Pendidikan bahwa mereka telah melakukan sosialisasi komunikasi mengenai Platform Merdeka Mengajar ini secara intens. Selain itu juga pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang selalu sigap apabila ada keluhan dan *update* mengenai informasi Platform Merdeka Menejar . Faktor Penghambat mengenai Implementasi Platform Merdeka Mengajar masih banyak kendala hal ini dibuktikan dengan usia lanjut tenaga pendidik yang enggan beradaptasi dengan teknologi dan lemahnya kecepatan internet di beberapa daerah. Upaya mengenai Implementasi ini masih kurang namun tetap saja ada pengontrolan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang itu sendiri, selain itu juga faktor pendukung agar PMM ini dilaksanakan yaitu dengan adanya permendikbudristek.

REFERENCES

- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara* (Cet 1 ed.). Pustaka Setia
- Ani, S., & Sulistio, E. B. (2017). Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, Dan Guidline) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Provinsi Lampung Tahun 2016. *Administrato Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 8(2017), 99-107.
- Dunn, W. N. (2016). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Kedua ed.). UGM Press.
- Masyhadi, I., *Tata Cara Penggunaan Platform Merdeka Mengajar*. (2022, August 24). BBPMP Jateng. Retrieved January 1, 2023, from <https://bbpmpjateng.kemdikbud.go.id/tata-cara-penggunaan-platform-merdeka-mengajar/>
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi 2017 ed.). Rosda
- Mulyadi, D. (2006). *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik* (Cetakan ke 2 Tahun 2018 ed.). Alfabeta
- Pasolong, H. (2008). *Teori Administrasi Negara* (2019th ed.). ALFABETA.
- Silalahi, U. (2020). *Studi Tentang Ilmu Administrasi* (2020th ed.). Sinar Baru Algesindo.
- Sudrajat, A. R., Pranawati, N. W., & Sawitri, N. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Satu Arah Pada Ruas Jalan Mayor Abdurahman Sumedang. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 5(1), 106-116. Retrieved from <https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/73>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharno. (2015). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Ombak.
- Tokan, F. B. (n.d.). Partisipasi Warga Sekolah Dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar : Gejayan. Retrieved from <https://eprints.uny.ac.id/18595/4/e.%20Bab%202%2009417144028.pdf>